



**INFORMASI INDIKATOR KINERJA
DIREKTORAT PENANGANAN PELANGGARAN
TAHUN 2024**

INDIKATOR KINERJA 1

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya Penyadartahuan yang Efektif Bagi Nelayan Untuk Tidak Melintas Batas ke Negara Lain Secara Ilegal
2. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai Pemahaman Nelayan Untuk Tidak Melintas Batas ke Negara Lain Secara Ilegal
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<p>Nilai Pemahaman Nelayan Untuk Tidak Melintas Batas Ke Negara Lain Secara Ilegal merupakan pemahaman peserta kegiatan penyadartahuan untuk tidak melakukan penangkapan ikan di negara lain tanpa izin, yang diselenggarakan di lokasi/daerah terpilih dengan melakukan penilaian melalui daftar pertanyaan kepada peserta/masyarakat nelayan terpilih</p> <p>Nilai pemahaman nelayan untuk tidak melintas batas ke negara lain secara ilegal dihitung dengan menggunakan teknik <i>sampling</i> kepada peserta (nelayan) dengan metode Jarwanto dan Pangestu Subagio, Statistik Induktif BPF UGM dengan rumus sebagai berikut:</p> $x = \frac{\sum a}{\sum b}$ <p>Keterangan :</p> <p>x = Nilai rata-rata pemahaman nelayan untuk tidak melakukan penangkapan ikan di negara lain tanpa izin setelah pelaksanaan kegiatan pemberian pemahaman;</p> <p>$\sum a$ = Jumlah nilai kuisioner nelayan yang diberikan pemahaman nelayan dari total <i>sampling</i> yang telah dilakukan penilaian;</p> <p>$\sum b$ = Jumlah nelayan yang menjadi responden diambil sebanyak 20% secara <i>random</i> dari total peserta yang hadir.</p>
4. SATUAN INDIKATOR	:	Nilai
5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	() Kuantitas/ Output (v) Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	() Output Kendali Tinggi () Output Kendali Rendah (v) Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	Direktorat Penanganan Pelanggaran
8. SUMBER DATA	:	Kuisioner pemahaman nelayan tidak melintas batas negara lain secara ilegal yang telah disampling
9. STATUS DATA	:	() Raw Data (v) Hasil Perhitungan Raw Data

10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 2

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<p>Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (KP) merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang, pada:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Dit. PP (Pusat) untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-2 (SP2)/surat penetapan denda administratif/rekomendasi pencabutan/pembekuan izin;b) Dit. PP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut untuk pelanggaran skala besar/mendapat perhatian publik, berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.c) Dit.PP (Pusat) untuk penetapan denda administratif, atau rekomendasi pembekuan/pencabutan izin/pemulihan fungsi ruang dari Dirjen PSDKP.d) UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah;e) UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.

Formula :

Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan

$$x = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$$

- x* : Indeks pengenaan sanksi administratif bidang KP
a : Jumlah pengenaan sanksi administratif bidang KP berdasarkan penetapan pertama
b : Jumlah keseluruhan kasus pelanggaran administratif yang ditangani berdasarkan hasil ekspose

Dengan Kriteria Indeks:

PERSENTASE	NILAI INDEKS MAKS	KRITERIA INDEKS
>50%	40	Kurang
50% - 75%	70	Cukup
75% - 100%	80	Baik
>100%	100	Sangat Baik

NO	TAHAP PENYELESAIAN	PERSENTASE PERKEMBANGAN KEMAJUAN (%)	DATA DUKUNG YANG HARUS DIPENUHI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ekspose	60	1. Undangan Ekspose 2. Hasil Ekspose
2	Penetapan Sanksi Administratif	40	Dokumen Penetapan Sanksi berupa Teguran (Surat Peringatan)/ Paksaan Pemerintah/ Denda Administratif
Jumlah		100	

- Perhitungan jumlah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan untuk pencapaian indikator kinerja Dit. PP merupakan penjumlahan dari pengenaan sanksi administratif poin a, poin b, dan poin c.
- Perhitungan jumlah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan untuk pencapaian indikator kinerja UPT PSDKP merupakan penjumlahan dari pengenaan sanksi administratif poin d dan poin e.
- Mempertimbangkan bahwa pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan bersifat kasuistis dan sangat dipengaruhi oleh eksternal, apabila tidak terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha/pemanfaat sumber daya kelautan dan perikanan, maka target pengenaan sanksi administratif dianggap tercapai

4. SATUAN INDIKATOR

: Indeks

5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	<input type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome	
7. UNIT KERJA / PJ	:	Direktorat Penanganan Pelanggaran dan UPT Lingkup DJPSDKP			
8. SUMBER DATA	:	Dokumen penetapan pertama pengenaan sanksi administratif bidang KP			
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data		
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 3

1. SASARAN KEGIATAN : Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas

2. INDIKATOR KINERJA : **Indeks Kesesuaian Penerapan Sanksi Administratif**

3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA :

- Indeks kesesuaian penerapan sanksi administratif (non SPKP) merupakan pengukuran tingkat kesesuaian proses sanksi administratif dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh UPT PSDKP sebelum adanya penetapan sanksi administratif, kegiatan ini dilakukn melalui Supervisi/MONEV oleh Direktorat Penanganan Pelanggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang dilakukan melalui beberapa jenis kegiatan antara lain : Ekspose eksternal (Daring/Luring) dan kunjungan lapangan, dengan memberikan penilaian kesesuaian penerapan sanksi administratif;
- Indeks kesesuaian diperoleh dari kesesuaian dugaan pasal dengan jenis sanksi yang akan digunakan

Formula :

Indeks Kesesuaian Penerapan Sanksi Administratif

$$(xd) = \left(\frac{a}{\sum b} \right) \times 100\%$$

xd = Indeks Kesesuaian Penerapan Sanksi Administratif

a = Jumlah pengenaan sanksi administratif yang telah dikenakan yang sesuai dengan peraturan perundang - undangan

$\sum b$ = Total kasus kasus pelanggaran yang direkomendasikan dikenakan sanksi administratif

Dengan Kriteria Indeks:

PERSENTASE	NILAI INDEKS MAKS	KRITERIA INDEKS
>50%	40	Kurang
50% - 75%	70	Cukup
75% - 100%	80	Baik
>100%	100	Sangat Baik

4. SATUAN INDIKATOR : Indeks

5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome	
7. UNIT KERJA / PJ	:	Direktorat Penanganan Pelanggaran			
8. SUMBER DATA	:	Form Kesesuaian Penerapan Sanksi Adminstratif			
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data		
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 4

1. SASARAN KEGIATAN : Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas

2. INDIKATOR KINERJA : **Indeks Tindak Lanjut Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA : Indeks Tindak Lanjut Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja dalam melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap indikasi dugaan pelanggaran dari analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan.

Formula :

$$X_{TLH} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + X_2 + X_n)}{n} \times 100\%$$

x_{TLH} : Indeks Tindak Lanjut Hasil Analisis Pemantauan SDKP

$x_{1+2+n..}$: Jumlah hasil pemeriksaan yang dinyatakan bukan pelanggaran dan telah dikenakan sanksi administratif

n : Jumlah hasil analisis SPKP yang telah dilakukan pemeriksaan lanjutan

Dengan Kriteria Indeks:

PERSENTASE	NILAI INDEKS MAKS	KRITERIA INDEKS
>50%	40	Kurang
50% - 75%	70	Cukup
75% - 100%	80	Baik
>100%	100	Sangat Baik

4. SATUAN INDIKATOR : Indeks

5. JENIS ASPEK TARGET : (v) Kuantitas/ Output () Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya

6. TINGKAT VALIDITAS	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	Direktorat Penanganan Pelanggaran		
8. SUMBER DATA	:	Form Tindak Lanjut Hasil Pemantauan/Laporan		
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data	
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 5

- 1. SASARAN KEGIATAN** : Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas
- 2. INDIKATOR KINERJA** : **Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif**
- 3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA** : Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif yaitu merupakan tingkat pencapaian kinerja permohonan penerbitan billing denda administratif dan rekomendasi pembukuan/pencabutan perizinan berusaha;

Formula

$$P = \sum_{i=1}^n \left(\frac{ACT_i + \dots + ACT_n}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

- P = Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif
ACT = Jumlah Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif yang telah dilaksanakan
N = Jumlah kasus pengenaan sanksi administratif yang ditangani

Dengan Kriteria Indeks:

PERSENTASE	NILAI INDEKS MAKS	KRITERIA INDEKS
>50%	40	Kurang
50% - 75%	70	Cukup
75% - 100%	80	Baik
>100%	100	Sangat Baik

- 4. SATUAN INDIKATOR** : Indeks
- 5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP** : (v) Kuantitas/ Output () Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya
- 6. TINGKAT VALIDITAS** : () Output Kendali Tinggi (v) Output Kendali Rendah () Outcome
- 7. UNIT KERJA / PJ** : Direktorat Penanganan Pelanggaran

8. SUMBER DATA	:	Surat Permintaan Penerbitan billing		
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data	
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 6

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (Penyerahan Tahap II)

Formula :

$$Xa = \left(\frac{a}{\sum b} \right)$$

Xa = Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

a = Jumlah kasus ditahun berjalan yang telah selesai ditangani dari diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan sampai dengan selesai (P-21 dan/atau penyerahan tahap II ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP-3), dikecualikan kasus kategori sulit ataupun diatasnya kasus bisa dihitung capaian selama 2 bulan dari proses SPRINDIK terbit

$\sum b$ = Total kasus Penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan di tahun berjalan

CATATAN TAMBAHAN:

- (1) Apabila sudah ditetapkan target capaian per triwulan penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dan tidak ada capaian kasus di periode tersebut, maka realisasi capaian sebesar target yang telah ditetapkan;
- (2) Apabila terdapat kasus yang dibiayai oleh unit satker pusat, maka perhitungan capaian kinerja diklaim sebagai capaian unit kerja yang membiayai dengan catatan di dalam SPRINDIK terdapat PPNS Pusat dalam pelaksanaan penyidikan;
- (3) Apabila sudah ditetapkan target capaian per triwulan penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan serta SPRINDIK tersebut terbit di akhir bulan perhitungan Triwulan, maka realisasi capaian dihitung pada Triwulan berikutnya.

(4) Terhadap kasus yang Sprindik dan SPDP nya diterbitkan pada bulan Desember tahun berjalan dan P21 atau SP3 kasus tersebut belum terbit pada tahun berjalan, maka diperhitungkan sebagai capaian kasus pada tahun berikutnya.

4. SATUAN INDIKATOR	:	Indeks
5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	<input type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi <input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input type="checkbox"/> Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	Direktorat Penanganan Pelanggaran dan UPT Lingkup DJPSDKP
8. SUMBER DATA	:	Berkas dimulai dari Surat Perintah Penyidik (SPRINDIK) sampai dengan Suat P-21/SP-3.
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data <input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input type="checkbox"/> Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 7

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggarannya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Kualitas Supervisi/Monitoring dan Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	Indeks kualitas Supervisi/MONEV penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan (TPKP) merupakan tingkat pencapaian kinerja Supervisi/MONEV penyidikan, penanganan barang bukti, dan penanganan awak kapal oleh UPT PSDKP/Dinas Kelautan dan Perikanan.

Indeks Kualitas Penanganan Pelanggaran terdiri dari 3 (tiga) komponen pembentuk dengan rumus, Sebagai berikut :

$$a = \frac{P1+P2+P3}{3}$$

Keterangan :

- a = Rata-rata indeks kualitas penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan
- P1 = Persentase Supervisi Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan [Kualifikasi bobot 40 %]
- P2 = Persentase Supervisi Penanganan Barang Bukti [Kualifikasi bobot 30 %]
- P3 = Persentase Supervisi Penanganan Awak Kapal [Kualifikasi bobot 30 %]

1. Persentase Supervisi Penyidikan Tindak Pidana bidang Kelautan dan Perikanan diukur melalui Persentase total kasus yang disupervisi berbanding dengan total kasus yang ditangani :
Dimana nilai $p1$ (Persentase Supervisi Penyidikan Tindak Pidana bidang Kelautan dan Perikanan),

$$P1 = \frac{\sum a}{\sum b} \times 100 \%$$

Keterangan:

- P1 = Persentase Supervisi Penyidikan Tindak Pidana Bidang Kelautan dan Perikanan
 $\sum a$ = Total Kasus Tindak Pidana Kelautan and Perikanan yang di supervisi proses penyidikan
 $\sum b$ = Total Kasus Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang ditangani

2. Persentase supervisi penanganan barang bukti pidana kelautan dan perikanan yang dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$P2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\%ACT_i + \dots + \%ACT_n}{n} \right)$$

Ket:

- P2 = Persentase supervisi penanganan Barang Bukti Tindak Pidana bidang Kelautan dan Perikanan
 %ACT = Persentase penyelesaian tahapan supervisi penanganan seperangkat barang bukti dalam pembuktian satu perkara tindak pidana kelautan dan perikanan atau lebih yang berkaitan, sejak barang bukti tersebut disita sampai dengan diserahkan kepada penuntut umum (P-21 Tahap II)
 N = Jumlah set barang bukti tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani

Nilai %ACT diperoleh dari persentase tahapan penyelesaian penanganan barang bukti sebagaimana tabel berikut:

NO	TAHAP PENYELESAIAN	PERSENTASE TAHAPAN (%)	DATA DUKUNG YANG DIPERLUKAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengumpulan data penanganan barang bukti	20	Data penanganan barang bukti	
2	Penentuan lokasi supervisi prioritas	20	Laporan koordinator mengenai lokasi yang	

			menjadi prioritas dilaksanakan supervisi	
3	Pelaksanaan koordinasi, supervisi dan monitoring evaluasi penanganan barang bukti	55	1. Laporan data penanganan barang bukti TPKP di UPT; 2. Laporan perjalanan dinas; 3. Laporan rapat monitoring penanganan barang bukti.	Data dukung pada poin 2 dan 3 bersifat opsional
4	Pelaksanaan penyerahan barang bukti	3	Surat pengantar penyerahan barang bukti TPKP (Tahap II)	
		2	BA serah terima barang bukti TPKP (Tahap II)	
JUMLAH		100		

3. Persentase Supervisi Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan.

$$P3 = \frac{\grave{a} + \acute{c}}{2}$$

Keterangan:

- P3 = Nilai rata-rata supervisi penanganan awak kapal tindak pidana perikanan dan kelautan
- \grave{a} = Persentase supervisi penanganan awak kapal tindak pidana perikanan dan kelautan yang dihitung berdasarkan perbandingan antara kasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang disupervisi dengan seluruh jumlah kasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang masuk
- \acute{c} = Indeks supervisi penanganan awak kapal tindak pidana perikanan dan kelautan yang diperoleh dari pengisian kuisioner oleh petugas penanganan awak kapal tindak pidana perikanan dan kelautan di lokasi supervisi yang dikonversi menjadi persentase

4. SATUAN INDIKATOR	:	Indeks			
5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	<input type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome	
7. UNIT KERJA / PJ	:	Direktorat Penanganan Pelanggaran			
8. SUMBER DATA	:	Laporan Supervisi/MONEV penanganan TPKP			
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data		<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data	
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 8

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Sinergi Penanganan Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan dengan Lembaga Lain
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Sinergi Bidang Kelautan dan Perikanan dengan Lembaga Lain yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sinergi terhadap aparat penegak hukum bidang KP melalui pelaksanaan forum tindak pidana perikanan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor PER.18/MEN/2011 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan

Hasil rata-rata Indeks Sinergi Aparat Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan yang dihitung berdasarkan rumus berikut :

Formula penghitungan:

- Metode pengukuran nilai pemahaman peserta menggunakan kuesioner *post test* yang berisi 5-10 pertanyaan yang disampaikan kepada seluruh peserta di sesi akhir forum;
- Nilai seluruh peserta forum dirata-rata sehingga diperoleh pemahaman peserta forum;

$$x_{ISPP} = \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{xn}$$

x_{ISPP} : Indeks Sinergi Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan

x_i : Tingkat pemahaman peserta forum tindak pidana perikanan

xn : Jumlah peserta forum tindak pidana perikanan yang masuk kedalam SK Menteri Instansi Anggota Forum Koordinasi Tindak Pidana Perikanan

Dengan Kriteria Indeks:

NILAI KUISONER	KRITERIA INDEKS SKALA LIKERT
0 – 50	Kurang
51 – 69	Cukup
70 – 85	Baik
86 – 100	Sangat Baik

4. SATUAN INDIKATOR	:	Indeks			
5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	<input type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome	
7. UNIT KERJA / PJ	:	Direktorat Penanganan Pelanggaran			
8. SUMBER DATA	:	Form Kuisoner Forum TPP			
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data		<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data	
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 9

1. SASARAN KEGIATAN : Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas

2. INDIKATOR KINERJA : **Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan**

3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA :

1. Intelijen penanganan pelanggaran merupakan segala usaha, tindakan dan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk pengumpulan sebagai data dan informasi, analisis, dan menyampaikan hasil analisis data dan informasi berdasarkan tujuan yang ditetapkan sebagai bahan pengambilan keputusan (*decision-making*) dan/atau operasional penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan.
2. Penyelesaian analisis data dan informasi intelijen penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan yaitu hasil analisis atas data dan informasi yang dikumpulkan untuk mendukung pimpinan dalam mengambil keputusan dan/atau mendukung operasional penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan.
3. Target Penyelesaian analisis data dan informasi intelijen penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan sebesar 100%.

Formula:

$$x_{anintel} = \frac{(X_1 + \dots + X_n)}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

$x_{anintel}$: Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan

x_i : Jumlah nilai tahapan pelaksanaan kegiatan

n : Jumlah bulan kegiatan

Tahapan dan penilaian penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan dilakukan mengacu pada tabel di bawah:

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Persiapan	15	Rencana kegiatan
2	Pelaksanaan	15	Rapat sinkronisasi data TPKP

3	Pelaporan	70	Data infografis TPKP yang sudah dianalisis
Jumlah Nilai		100	

4. SATUAN INDIKATOR	:	Persentase
5. JENIS ASPEK TARGET	:	() Kuantitas/ Output (<input checked="" type="checkbox"/>) Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Output Kendali Tinggi () Output Kendali Rendah () Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	Direktorat PP
8. SUMBER DATA	:	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pengamatan / penyusupan/ penjejukan • Hasil Pulbaket • Laporan masyarakat
9. STATUS DATA	:	() Raw Data (<input checked="" type="checkbox"/>) Hasil Perhitungan Raw Data
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	() Akumulasi (<input checked="" type="checkbox"/>) Rata-rata () Nilai Posisi Akhir
11. METODE CASCADING	:	() Lingkup Dipersempit () Komponen Pembentuk (<input checked="" type="checkbox"/>) Buat Baru
12. POLARISASI	:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Maximize () Minimize () Stabilize
13. PERIODE PELAPORAN	:	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (<input checked="" type="checkbox"/>) Tahunan

INDIKATOR KINERJA 10

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK bidang Pengawasan SDKP lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none">• Persentase penyelesaian Rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat PP adalah perbandingan nilai tahapan penyelesaian Rancangan NSPK dengan jumlah target rancangan NSPK yang diselesaikan• Penyelesaian rancangan NSPK dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan, dan pelaporan• Rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat PP merupakan seluruh rancangan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) dan produk peraturan perundang-undangan yang disusun lingkup Direktorat PP yang siap ditindaklanjuti untuk proses <i>legal drafting</i> dan pengesahan dalam kurun waktu satu tahun

Pengukuran Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran, yaitu:

$$X_{NSPK} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + \dots + X_n)}{n} \times 100\%$$

x_{NSPK} : Persentase penyelesaian draft NSPK bidang Pengawasan SDKP lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran

$x_{n \text{ Dit. PP}}$: Nilai tahapan penyelesaian draft NSPK bidang Pengawasan SDKP lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran

n : Jumlah target rancangan NSPK bidang Pengawasan SDKP yang diselesaikan lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran

No	Tahapan Penyelesaian	Nilai	Output
----	----------------------	-------	--------

1.	Persiapan	15	. Identifikasi substansi . Outline . Draft Awal
2.	Pelaksanaan	70	. Pembahasan draft . Uji Publik Draft . Draft yang siap ditindaklanjuti untuk proses <i>legal drafting</i> dan pengesahan
3.	Pelaporan	15	Memorandum dan draft final yang disampaikan ke Setditjen PSDKP

4. SATUAN INDIKATOR	:	Persentase
5. JENIS ASPEK TARGET	:	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi <input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input type="checkbox"/> Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	Direktorat Penanganan Pelanggaran
8. SUMBER DATA	:	Draft NSPK yang disusun lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data <input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 11

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas		
2. INDIKATOR KINERJA	:	Tingkat Pemahaman Peserta Bimtek lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran		
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none">• Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat PP adalah ukuran untuk mengetahui pemahaman peserta dalam mengikuti kegiatan Bimtek yang diselenggarakan oleh Direktorat PP;• Bimtek lingkup Direktorat PP adalah salah satu uraian tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Direktorat PP dalam rangka meningkatkan pengetahuan teknis kepada Penyidik Perikanan dan Non Penyidik Perikanan dalam melaksanakan kegiatan Penanganan Pelanggaran pidana maupun sanksi administratif		
		Formula penghitungan: <ul style="list-style-type: none">• Metode pengukuran nilai pemahaman peserta pelatihan/Bimtek lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran menggunakan kuesioner <i>post test</i> yang berisi 5-10 pertanyaan yang disampaikan kepada seluruh peserta di sesi akhir pelatihan/Bimtek;• Nilai seluruh peserta pelatihan/Bimtek dirata-rata sehingga diperoleh gambaran tingkat pemahaman peserta pelatihan/Bimtek;• Tingkat pemahaman peserta pelatihan/Bimtek lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran diperoleh dari rata-rata tingkat pemahaman peserta pelatihan/Bimtek yang dilaksanakan pada lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran $x_{Bimtek} = \sum_{i=1}^n \frac{x_i + \dots + x_n}{n}$ <p>x_{Bimtek} : Tingkat pemahaman peserta pelatihan/Bimtek lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran x_i : Tingkat pemahaman peserta suatu pelatihan/Bimtek n : Jumlah pelatihan/Bimtek lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran</p>		
4. SATUAN INDIKATOR	:	Nilai		
5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Kuantitas/ Output	(<input type="checkbox"/>) Kualitas/ Mutu	(<input type="checkbox"/>) Waktu (<input type="checkbox"/>) Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	(<input type="checkbox"/>) Output kendali tinggi	(<input checked="" type="checkbox"/>) Output kendali rendah	(<input type="checkbox"/>) Outcome

7. UNIT KERJA / PJ	:	Direktorat Penanganan Pelanggaran		
8. SUMBER DATA	:	Hasil post test pelatihan/Bimtek lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran		
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data	
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input checked="" type="checkbox"/> Rata-rata	<input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 12

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggarannya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas			
2. INDIKATOR KINERJA	:	Inovasi yang Dihasilkan lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran			
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none">• Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinil dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.• Untuk sementara, penetapan ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 50 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara• Kriteria Inovasi: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan• Kelompok inovasi: umum, khusus• Aspek penilaian Kelompok Umum: ringkasan (5%), ide inovatif (20%), Signifikansi (25%), Kontribusi terhadap capaian TPB (5%), Adaptabilitas (20%), keberlanjutan (20%), Kolaborasi pemangku kepentingan (5%)• Aspek penilaian Kelompok Khusus: Pembaruan/Peningkatan inovasi (25%), Adaptabilitas (20%), Penguatan keberlanjutan (25%), Evaluasi (30%)• Persyaratan inovasi: memenuhi seluruh kriteria inovasi;selaras dengan tema kompetisi; relevan dengan salah satu kategori kompetisi dan kelompok inovasi, diajukan dalam bentuk proposal dan disertai dokumen pendukung; menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepastasan			
		Inovasi dihitung dari jumlah inovasi yang diusulkan untuk tahap seleksi administrasi di tingkat Ditjen PSDKP.			
4. SATUAN INDIKATOR	:	Inovasi			
5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	(v) Kuantitas/ Output	() Kualitas/ Mutu	() Waktu	() Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	(v) Output Kendali Tinggi	() Output Kendali Rendah	() Outcome	

7. UNIT KERJA / PJ	:	Direktorat Penanganan Pelanggaran		
8. SUMBER DATA	:	Usulan inovasi lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran		
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data	
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 13

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none">● Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.● Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.● Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.● Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

Formula:

$$X = \frac{a}{b} \times 100$$

Keterangan:

- X = Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko
a = Dokumen pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko yang dipenuhi
b = Jumlah dokumen Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko

4. SATUAN INDIKATOR	:	Persentase			
5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome	
7. UNIT KERJA / PJ	:	Direktorat Penanganan Pelanggaran			
8. SUMBER DATA	:	Form Pengendalian dan Pemantauan Risiko			
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data		
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input checked="" type="checkbox"/> Rata-rata	<input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru	
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 14

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP
2. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen PSDKP
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<p>a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.</p> <p>b. Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan sistem kearsipan internal Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:<ul style="list-style-type: none">• Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;• Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal<ol style="list-style-type: none">a. Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau mewakili nilai guna kesejarahan.

Nilai pengawasan kearsipan lingkup Ditjen PSDKP akan diukur oleh Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya hasilnya akan disampaikan melalui surat resmi oleh Kepala Biro Umum dan PBJ.

Nilai Pengawasan Kearsipan lingkup Ditjen PSDKP = Hasil Audit Sistem Kearsipan Internal Unit Kearsipan
 Nilai dan kategori hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh Objek Pengawasan :

KATEGORI	INTERVAL SKOR	
AA	Sangat Memuaskan	> 90 - 100
A	Memuaskan	>80 – 90
BB	Sangat Baik	>70 – 80
B	Baik	>60 – 70
CC	Cukup	>50 – 60
C	Kurang	>30 – 50
D	Sangat Kurang	>0 - 30

4. SATUAN INDIKATOR	:	Nilai
5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	<input type="checkbox"/> Output kendali tinggi <input checked="" type="checkbox"/> Output kendali rendah <input type="checkbox"/> Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	Direktorat Penanganan Pelanggaran
8. SUMBER DATA	:	Biro Umum PBJ
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data <input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 15

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none">● Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin per masing-masing Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya;● Kualifikasi [Bobot 25%] yaitu yang berkenaan dengan tingkat pendidikan ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan penilaian sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">● Pendidikan: S3 (Nilai 25); S2 (Nilai 20); S1 (Nilai 15); D3 (Nilai 10); DII/DI/SMA (Nilai 5); SMP/SD (Nilai 1)● Kompetensi [Bobot 40%] yaitu yang berkenaan dengan keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Eselon) serta Diklat Fungsional, Diklat 20JP, atau Seminar (Bagi ASN Non Eselon), dengan penilaian sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">● Pejabat Struktural dihitung dgn komponen:<ul style="list-style-type: none">○ DIKLATPIM: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)○ DIKLAT 20JP: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)○ SEMINAR: Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)● Pejabat Fungsional Tertentu dihitung dgn komponen:<ul style="list-style-type: none">○ DIKLAT Teknis/Fungsional: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)○ DIKLAT 20JP; Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)○ SEMINAR. Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)● Pejabat Fungsional Umum/Staf dihitung dgn komponen:<ul style="list-style-type: none">○ DIKLAT 20 JP; Pernah ikut (Nilai 22,5), tidak pernah (nilai 0)○ SEMINAR. Pernah ikut (Nilai 17,5), tidak pernah (nilai 0)● Kinerja (Bobot 30%) yaitu berkenaan dengan hasil penilaian prestasi kerja ASN melalui aplikasi Penilaian Perstasi Kerja Online KKP yang dikolaborasikan dengan database kepegawaian (SIMPEG Online KKP), dengan penilaian sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">a. Nilai SKP 91 – Ke atas Nilai : 30 (Sangat Baik)b. Nilai SKP 76 – 90 Nilai : 25 (Baik)c. Nilai SKP 61 – 75 Nilai : 15 (Cukup)

- d. Nilai SKP 51 – 60 Nilai : 5 (Kurang)
- e. Nilai SKP 50 ke bawah Nilai : 1 *Buruk)
- Disiplin (Bobot 5%) yaitu berkenaan dengan pernah atau tidaknya ASN dijatuhi hukuman disiplin, dengan penilaian sebagai berikut:
 - b. Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Nilai 5;
 - c. Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Ringan Nilai 3
 - d. Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Sedang Nilai 2
 - e. Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Berat Nilai 1

- ASN Struktural :

$$\frac{(\text{Nilai Kualifikasi}) + (\text{Kompetensi}(\text{Diklatpim} + \text{Diklat20oj} + \text{Seminar})/3) + (\text{Nilai Skp}) + (\text{Nilai Disiplin})}{4}$$
- ASN Fungsional :

$$\frac{(\text{Nilai Kualifikasi}) + (\text{Kompetensi}(\text{Diklat Fungsional} + \text{Diklat20oj} + \text{Seminar})/3) + (\text{Nilai Skp}) + (\text{Nilai Disiplin})}{4}$$
- ASN Staf :

$$\frac{(\text{Nilai Kualifikasi}) + (\text{Kompetensi}(\text{Diklat20oj} + \text{Seminar})/3) + (\text{Nilai Skp}) + (\text{Nilai Disiplin})}{4}$$

4. SATUAN INDIKATOR	:	Indeks
5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	() Kuantitas/ Output (<input checked="" type="checkbox"/>) Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Output kendali tinggi () Output kendali rendah () Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	Direktorat Penanganan Pelanggaran
8. SUMBER DATA	:	Aplikasi SIMPEG Online KKP; Aplikasi E-SKP
9. STATUS DATA	:	() Raw Data (<input checked="" type="checkbox"/>) Hasil Perhitungan Raw Data
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	() Akumulasi () Rata-rata (<input checked="" type="checkbox"/>) Nilai Posisi Akhir
11. METODE CASCADING	:	() Lingkup Dipersempit () Komponen Pembentuk (<input checked="" type="checkbox"/>) Buat Baru
12. POLARISASI	:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Maximize () Minimize () Stabilize
13. PERIODE PELAPORAN	:	() Bulanan () Triwulanan (<input checked="" type="checkbox"/>) Semesteran () Tahunan

INDIKATOR KINERJA 16

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP		
2. INDIKATOR KINERJA	:	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran		
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.		
		Hasil penilaian oleh Inspektorat Mitra berdasarkan lembar kerja evaluasi yang disusun itjen dengan mengacu pada lembar kerja evaluasi AKIP oleh KEMENPAN RB		
4. SATUAN INDIKATOR	:	Nilai		
5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	Ditjen. PSDKP		
8. SUMBER DATA	:	<ul style="list-style-type: none">● Itjen KKP (Inspektorat I-V dan Bagian PHP Sekretariat Itjen)● Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP (Eselon II Pusat dan UPT)		
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data	
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 17

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada 1 Oktober 2021 (TW IV tahun sebelumnya) s.d 31 September 2022 (TW III periode berjalan) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP
		ΣN : Jumlah dokumen hasil rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP Keterangan Pola Perhitungan : TW I = Nilai TW I TW II = Nilai rata-rata dari (TW1+TW2)/2 TW III = Nilai rata-rata dari ((TW1+TW2+TW3)/3 TW IV = Nilai rata-rata dari ((TW1+TW2+TW3+TW4)/4
4. SATUAN INDIKATOR	:	Persentase
5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	() Kuantitas/ Output (v) Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	(v) Output kendali tinggi () Output kendali rendah () Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	Ditjen. PSDKP
8. SUMBER DATA	:	<ul style="list-style-type: none">● Itjen KKP (Inspektorat I-V dan Bagian PHP Sekretariat Itjen)● Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP (Eselon II Pusat dan UPT)
9. STATUS DATA	:	() Raw Data (v) Hasil Perhitungan Raw Data
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	() Akumulasi () Rata-rata (v) Nilai Posisi Akhir

11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru	
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 18

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP		
2. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran		
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none">• Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker• Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja		
4. SATUAN INDIKATOR	:	Nilai		
5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	Direktorat Penanganan Pelanggaran		
8. SUMBER DATA	:	Pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja		
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data	
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 19

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none">● Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah maupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.● Terdapat 3 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu:<ul style="list-style-type: none">○ Dokumen: Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Informasi Indikator Kinerja, Laporan Kinerja & Interim, Rencana Kerja RB, Renaksi Kinerja;○ Keikutsertaan: Pimpinan Unit Eselon I-IV, Staf (minimal 2 orang per Unit Eselon IV);○ Keaktifan: Pimpinan Unit Eselon I-Staf
		<ul style="list-style-type: none">● UKURAN : Komponen Pembentuk dari unit kerja eselon II. Yang dinilai, yaitu:<ul style="list-style-type: none">a) Dokumen (PK es 3, 4, Informasi Indikator Kinerja dan Laporan Kinerja eselon 2)b) Keikutsertaan (Persentase pejabat dan staf yang tergabung dalam aplikasi Bitrix)c) Keaktifan (upload dokumentasi kegiatan/informasi dilengkapi dengan foto atau video (es II) atau notulensi hasil rapat yang bersifat boleh dipublikasikan dan PPT rapat terkait kegiatan prioritas dengan kriteria mengandung informasi 5W1H);● CARA MENGUKUR :<ul style="list-style-type: none">a) Menggunakan Aplikasi Bitrixb) Pengukuran dilakukan setiap triwulan dengan target yang telah ditetapkanc) Pengukuran dokumen:<ul style="list-style-type: none">a. Perjanjian Kinerja dilakukan setiap tahunb. Laporan Kinerja dilakukan setiap triwulanc. Renaksi Kinerjad) Keikutsertaan akan direkap setiap hari dalam satu triwulane) Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal 1 kali upload informasi.

- f) Untuk konten video diharapkan **bersifat edukasi atau ajakan**, yang **di upload minimal satu kali dalam triwulan**.
- g) Rekonsiliasi realisasi dengan **mengundang penanggung jawab eselon I dilakukan setiap triwulan**.
- h) Pengukuran level 1 dihitung dengan **lingkup pejabat pusat**.
- i) **Pusdatin menyediakan data hasil rekapan pejabat yang telah aktif** pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai IKU MP masing-masing unit kerja eselon I.
- j) Hasil capaian pada akhir tahun merupakan **nilai rata-rata capaian pada triwulan I-IV**.

Keterangan Pila Perhitungan :

TW I = Nilai TW I

TW II = Nilai rata-rata dari (TW1+TW2)/2

TW III = Nilai rata-rata dari ((TW1+TW2+TW3)/3

TW IV = Nilai rata-rata dari ((TW1+TW2+TW3+TW4)/4

4. SATUAN INDIKATOR	:	Persentase			
5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome	
7. UNIT KERJA / PJ	:	Direktorat Penanganan Pelanggaran			
8. SUMBER DATA	:	Portal <i>collaboration office</i> KKP			
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data		
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru	
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 20

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP		
2. INDIKATOR KINERJA	:	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran		
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Eselon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: 1) Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023; 2) Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 Tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang; 3) Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019; 4) Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2022 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian; 5) Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.		
4. SATUAN INDIKATOR	:	Nilai		
5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	Direktorat Penanganan Pelanggaran		
8. SUMBER DATA	:	Inspektorat Jenderal KKP		
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data	
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize

13. PERIODE PELAPORAN

: Bulanan

Triwulanan

Semesteran

Tahunan

INDIKATOR KINERJA 21

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP			
2. INDIKATOR KINERJA	:	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran			
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: 1) Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%); 2) Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%); 3) Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%); 4) Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).			
4. SATUAN INDIKATOR	:	Nilai			
5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome	
7. UNIT KERJA / PJ	:	Direktorat Penanganan Pelanggaran			
8. SUMBER DATA	:	Inspektorat Jenderal KKP			
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data		
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru	
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 22

1. SASARAN KEGIATAN

Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat PP

2. INDIKATOR KINERJA

Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat PP (%)

3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA

- Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran digunakan untuk mengukur kinerja penyerapan anggaran lingkup Direktorat PP tahun 2023
- Dalam rangka mencapai target realisasi anggaran, dilaksanakan aktivitas Pengendalian berupa :
 1. Memastikan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Uang Persediaan sesuai dengan Kaidah;
 2. Memastikan Penyelesaian Kegiatan Kontraktual sesuai dengan aturan yang berlaku;
 3. Memastikan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Akuntabel, dan
 4. Meminimalisir Deviasi halaman III DIPA.

Formula:

$$f = \frac{x}{y} \times 100\%$$

Keterangan:

<i>f</i>	:	Persentase Realisasi Anggaran
<i>x</i>	:	Target Penyerapan Anggaran Tahun 2023
<i>y</i>	:	Pagu Anggaran Tahun 2023 (Tanpa Blokir)

4. SATUAN PENGUKURAN

5. JENIS ASPEK TARGET

(v) Kuantitas/
Output

() Kualitas/ Mutu

() Waktu

() Biaya

6. TINGKAT VALIDITAS IK

(v) Output Kendali Tinggi

() Output Kendali Rendah

() Outcome

7. PENJELASAN VALIDITAS	Indikator ini diukur secara mandiri oleh Direktorat PP dan pencapaian target secara dominan dipengaruhi oleh internal Direktorat PP, sehingga validitas yang dipilih adalah output kendali tinggi.		
8. UNIT KERJA / PJ	Direktur Penanganan Pelanggaran		
9. SUMBER DATA	a. Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN) b. LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu c. Laporan Monitoring Kegiatan Kontraktual d. Laporan Monitoring Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan e. Laporan Monitoring Deviasi halaman III DIPA		
10. STATUS DATA	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data	
11. JENIS PERHITUNGAN DATA	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
12. METODE CASCADING	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
13. POLARISASI	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
14. PERIODE PELAPORAN	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran
			<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan



Direktur Penanganan Pelanggaran

Teuku Elvitryah, S.H.,M.M.
NIP. 19690424 199403 1 002